



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA MASA RESES KOMISI X DPR RI
KE KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2023—2024
TANGGAL 6 S.D 10 DESEMBER 2023

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Pasal 20A ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.
2. Pasal 98 ayat (4) huruf f UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
3. Pasal 59 ayat (3) huruf f Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
4. Keputusan Pimpinan DPR RI tentang penugasan kepada anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan Kunjungan Kerja Berkelompok Masa Reses pada Masa Persidangan I tahun sidang 2023—2024.
5. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 11 September 2023 tentang rencana kunjungan kerja Komisi X DPR RI Masa Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023—2024 ke Kota Padang Panjang Sumatera Barat, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur dan Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan.

B. Tujuan

Kunjungan kerja ini ditujukan untuk mendapatkan penjelasan secara langsung dari pejabat daerah mengenai implementasi undang-undang dan kebijakan yang dilakukan pemerintah, menggali dan menyerap aspirasi dari daerah, dan mendapatkan masukan berupa data-data faktual dan berbagai persoalan tentang pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga, serta perpustakaan di daerah yang dikunjungi.

II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

A. Agenda Kunjungan Kerja

1. Pertemuan dengan Sekretaris Daerah-Kota Banjarbaru, H. Said Abdullah, yang dihadiri oleh:
 - a. Pimpinan/Anggota DPRD Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan
 - b. Anggota Bappeda Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan
 - c. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan

- d. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Banjarbaru
 - e. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Banjarbaru
 - f. Pimpinan LLDIKTI Wilayah XI Kalimantan
 - g. Dewan Pendidikan dan Perwakilan Organisasi Profesi Guru (PGRI, IGI, FSGI) Tokoh-tokoh Pendidikan, dan para Pakar Pendidikan Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan
 - h. Perwakilan Organisasi Kepemudaan (KONIDA, KNPI, Gerakan Pramuka)
 - i. Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Selatan
 - j. PHRI, ASITA, PUTRI, HPI, Masyarakat Pariwisata Indonesia, Generasi Pesona Indonesia, Komunitas dan Pelaku Ekonomi Kreatif Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan
2. Melakukan kunjungan ke pusat industri kreatif kota Banjarbaru Kalimantan Selatan
- a. Kampung Purun, kampung ini berada di Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. Kampung Purun saat ini merupakan kawasan wisata kampung tematik, karena sejumlaharganya memiliki kegiatan membuat anyaman purun.¹ Anyaman purun merupakan kegiatan seni masyarakat di kampung purun karena banyak terdapat tanaman purun yang hidup secara alami di rawa-rawa belakang rumah warga setempat. Tanaman purun ini dimanfaatkan menjadi berbagai kerajinan tangan dengan berbagai jenis variasi. Beberapa temuan dan informasi yang tercatat saat kunjungan lapangan, sebagai berikut:
 - 1) Pengrajin di Kampung Purun telah dilibatkan sebagai guru ekstrakurikuler oleh sekolah untuk melatih siswa membuat kerajinan tangan dari purun.
 - 2) Hasil kerajinan telah dijual melalui media sosial (instagram) atau melalui galeri-galeri *offline*.
 - 3) Melalui Bank Indonesia, pengrajin telah mendapatkan pembinaan dan pelatihan membuat produk layak ekspor.
 - 4) Hasil-hasil produksi pengrajin Kampung Puring belum mendapatkan Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
 - b. *Creative Hub* Dekranasda Kota Banjarbaru, tempat ini semula adalah Mess "L" Lanud Sjamsudin Noor yang diubah oleh Pemda Kota Banjarbaru bekerja sama dengan Dekranasda Kota Banjarbaru; menjadi kawasan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

¹ *Kampung Purun Cempaka Banjarbaru Suguhan Galeri Hasil Kerajinan Purun*, <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/10/04/kalselpedia-kampung-purun-cempaka-banjarbaru-suguhan-galeri-hasil-kerajinan-purun>, diakses 10 Januari 2023, pukul 13.53WIB.

serta industri menengah (IKM) Banjarbaru.² Beberapa temuan dan informasi yang tercatat saat kunjungan lapangan, sebagai berikut:

- 1) Belum memiliki lokasi permanen, saat ini masih bertempat di lahan/bangunan milik Lanud Sjamsuddin Noor.
- 2) Rerata produk hasil kerajinan telah mendapatkan sertifikat HAKI dan telah dipasarkan ke luar negeri, khususnya di negara Perancis.
- 3) Produk kerajinan tangan dipasarkan melalui jalur *offline*, seperti pembukaan galeri dan pameran dan *online* melalui media sosial khususnya instargram dan *website*.

B. Susunan Keanggotaan Tim

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023—2024 ke Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan dipimpin oleh Dr. H. Abdul Fikri Faqih. Tim Kunjungan kerja reses, didampingi oleh pejabat dari kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi X DPR RI, yaitu Kemendikbudristek RI, Kemenparekraf/Baparekraf RI, Kemenpora RI, dan Perpunas RI. Tim juga didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI serta wartawan Sekretariat Jenderal DPR RI.

C. Identifikasi Data Dan Informasi

1. Bidang Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi

Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru menyatakan secara tertulis bahwa seluruh program Merdeka Belajar yang terdiri dari 26 episode, sudah dilaksanakan dengan menyesuaikan kondisi lingkungan Kota Banjarbaru. Kegiatan yang terintegrasi antara pelaksanaan Kurikulum Merdeka dan pemanfaatan TIK terlihat pada penjelasan bahwa semua sekolah sudah melaksanakan Kurikulum Merdeka dengan 90% sekolah sudah memiliki akun belajar.id.

Guru di Kota Banjarbaru aktif memanfaatkan akun belajar.id dan mengakses *platform* merdeka mengajar guna menerapkan Kurikulum Merdeka dan mengembangkan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Guru juga aktif mengembangkan konten *platform* merdeka mengajar dan berinteraksi dalam wadah komunitas belajar. Program Penggerak (Sekolah, Guru, dan Organisasi).

Pelaksanaan pembelajaran di sekolah penggerak menjadi rujukan dalam mengimplementasikan merdeka belajar yang bertujuan membentuk profil pelajar Pancasila melalui pengadaan proyek-projek profil pelajar Pancasila. Program Guru Penggerak sebagai penguat perubahan paradigma guru terlaksana dengan baik. Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas sudah dilaksanakan melalui mekanisme guru penggerak.

²Banjarbaru Keren, Mess L Disulap Menjadi Dekranasda Creative Hub, <https://infopublik.id/kategori/nusantara/607552/banjarbaru-keren-mess-l-disulap-menjadi-dekranasda-creative-hub>, diakses 10 Januari 2023, pukul 13.53WIB.

Dinas Pendidikan akan melaksanakan penguatan dari segi kuantitas guru agar mampu memengaruhi ekosistem pendidikan secara lebih luas.

Kebijakan organisasi penggerak menurut Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru masih terkesan tumpang tindih dengan program Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) atau Balai Guru Penggerak. Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru mengharapkan Program Organisasi Penggerak (POP) lebih kreatif dalam mengkatalisasi program Kemendikbudristek dan mampu menciptakan inovasi berdasarkan kebutuhan di lapangan.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tingkat SMP sudah dilaksanakan secara daring dan sistem zonasi sudah berjalan dengan baik. Untuk tingkat SD masih dilaksanakan semi daring. Program bantuan sosial seperti PIP dan BOS sudah berjalan dengan baik. Untuk meningkatkan penyaluran dana bantuan tersebut, Dinas Pendidikan telah membangun data geospasial untuk penerima PIP se-kota Banjarbaru sebagai langkah verifikasi lapangan. *Database* sudah dibangun dan akan terus dikembangkan. Kendala dalam mekanisme penyaluran PIP adalah adanya kesenjangan pengetahuan antara kebijakan dan verifikator di sekolah.

Penyaluran dana BOS per Desember 2023 memasuki triwulan terakhir. Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru telah menggunakan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah versi 4.0 terbaru untuk semua sekolah. Hal ini disadari bahwa penguasaan akan aplikasi ini menjadi dasar mengelola dana BOS yang dimulai dari penyusunan rapor pendidikan berdasarkan ANBK dan Survey Lingkungan Belajar yang di dalamnya berisi angka literasi, numerasi, kebinekaan, keamanan, dan toleransi di sekolah. Hasil penilaian tersebut akan menjadi perencanaan berbasis data yang dituangkan dalam Aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (ARKAS). Kota Banjarbaru pada tahun 2023 mendapatkan angka literasi dan numerasi terbaik se Kalimantan Selatan.

Pendidikan khusus dan layanan khusus di kota banjarbaru sudah mengarah kepada pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD). Saat ini Pemkot Banjarbaru melalui Dinas Pendidikan sedang menyusun Naskah Akademik dan Draf Peraturan Walikota. Jumlah Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD) per Desember 2023 berjumlah 681 siswa dan diampu oleh 171 Guru Pembimbing Khusus (GPK). Kota Banjarbaru sudah mengangkat GPK sesuai kebutuhan sekolah dan membuat informasi jabatan secara khusus untuk mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus.

Pelaksanaan rekrutmen Guru PPPK dan ASN berjalan baik. Namun belum mampu menjawab kebutuhan guru di sekolah. Hal ini disebabkan ada rentang waktu yang panjang antara penetapan formasi dan pelaksanaan seleksi yang tidak sinergi dengan jumlah guru pensiun setiap tahunnya. Dinas Pendidikan memberikan saran agar waktu rekrutmen

harus linier dengan jumlah guru pensiun dan kebutuhan kekurangan formasi di sekolah.

LLDIKTI Wilayah X Kalimantan menyampai data perguruan tinggi swasta per Desember 2023 sebagai berikut:

a. Jumlah dan Bentuk PTS

Wilayah	PTS Akademik			PTS Vokasi			Jumlah
	Universitas	Institut	Sekolah Tinggi	Akademi	Politeknik	Akademi Komunitas	
PTS KALBAR	7	6	16	11	2	0	42
PTS KALTENG	7	1	11	1	4	0	24
PTS KALSEL	7	1	21	9	6	1	45
PTS KALTIM	9	2	21	7	6	1	46
PTS KALTARA	1	1	2	1	3	0	8
	31	11	71	29	21	2	165

b. Rekapitulasi Akreditasi Perguruan Tinggi

No	APT	Peringkat									Jumlah
		A	B	C	Unggul	Baik Sekali	Baik	Terakreditasi	Tidak Terakreditasi (TMSP)	Belum Terakreditasi/ kedaluwarsa	
1	PTS KALBAR	0	7	0	0	3	18	3	3	8	42
2	PTS KALTENG	0	1	0	0	1	17	2	1	2	24
3	PTS KALSEL	0	6	0	0	3	22	6	1	7	45
4	PTS KALTIM	0	8	0	0	7	18	3	1	9	46
5	PTS KALTARA	0	0	0	0	0	3	1	0	4	8
		0	22	0	0	14	78	15	6	30	165
Persentase		0	13,33	0,00	0	8,48	47,27	9,09	3,64	18,18	100

Persentase APT Terakreditasi	Persentase APT Tidak/Belum Terakreditasi
78,18181818	21,82

c. Akreditasi Program Studi PTS

NO	PROVINSI	JUMLAH PTS	JUMLAH PRODI	PERINGKAT								
				UNGGUL	A	B	BAIK SEKALI	C	BAIK	TIDAK TERAKREDITASI	TERAKREDITASI MINIMAL	KEDALUWARSA
1	KALBAR	43	163	0	1	52	8	7	55	2	22	16
2	KALTENG	25	95	1	2	28	8	5	39	0	3	9
3	KALSEL	45	199	0	0	70	17	10	57	5	16	24
4	KALTIM	49	196	0	1	74	9	5	67	2	11	27
5	KALTARA	7	28	0	0	2	0	2	13	2	0	9
TOTAL		169	681	1	4	226	42	29	231	11	52	85

Pada tahun 2022 sebanyak 169 PTS menjadi 165 PTS pada tahun ini, namun mengalami penambahan prodi yang sebelumnya berjumlah 681 menjadi 682. Untuk yang Akreditasinya Unggul dan A, ada 1 dan 4 prodi yang masih sama dengan tahun yang lalu. Untuk akreditasi B, C, dan Baik mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan PTS kami *mengupgrade* akreditasi menjadi “Baik sekali” yang pada tahun 2022 sejumlah 42 Prodi menjadi 102 Prodi pada tahun 2023. Untuk Prodi TMSP juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Yakni “Tidak terakreditasi” 8 “Terakreditasi minimal” 43 dan “Kedaluarsa” 63, yang sebelumnya Tidak terakreditasi” 11 “Terakreditasi minimal” 52 dan “Kedaluarsa” 85 pada tahun 2022.

Kendala yang dihadapi oleh PTS untuk meningkatkan akreditasi yakni mahal nya proses reakreditasi pada LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri).

d. Dosen Status memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).

KATEGORI	RINCIAN	JUMLAH
JUMLAH DOSEN NIDN		6,440
JABATAN FUNGSIONAL	GURU BESAR	17
	LEKTOR KEPALA	178
	LEKTOR	1,524
	ASISTEN AHLI	1,984
	BELUM MEMILIKI JAFUNG	2,737
PENDIDIKAN	S2	5,596
	S3	524
	LAIN-LAIN (S1/PROFESI)	320
SERTIFIKASI DOSEN	2,059	
JUMLAH PTS	TOTAL	165
	AKADEMIK	31
	POLITEKNIK	11
	SEKOLAH TINGGI	21
	INSTITUT	72
	UNIVERSITAS	30

Permasalahan yang muncul di era Pandemi dan Pasca pandemi Covid-19 serta cara mengatasinya:

- a. Layanan dan pembelajaran tidak boleh terhenti, walaupun bekerja dan atau belajar dari rumah;
- b. Pelaksanaan pelayanan dan pembelajaran secara *online/daring*;
- c. Apabila diperlukan tatap muka, maka protokol Kesehatan harus dijaga.

LLDIKTI Wilayah XI Kalimantan telah memanfaatkan program pendidikan tinggi yang disalurkan melalui Ditjen Diktiristek, antara lain program perizinan kelembagaan melalui laman SIAGA dan SILEMKERMA, program bantuan pendanaan kepada konsorsium PLTK untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru (PPG), akselerasi program penggabungan dan penyatuan PTS.

Terkait program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, LLDIKTI Wilayah XI turut mendorong untuk bisa menyukseskan program kampus merdeka di wilayah Kalimantan serta juga terciptanya *link and match* antara perguruan tinggi dengan dunia praktisi/industri. Dengan demikian esensi bahwa LLDIKTI Wilayah XI sebagai representasi dari kementerian di masing-masing wilayah adalah menjadi 'hub' atau penghubung antara perguruan tinggi di wilayah LLDIKTI XI, dunia industri serta juga kebijakan kementerian itu sendiri. Dalam konteks SDM, LLDIKTI XI merasa bahwa dukungan SDM dari perguruan tinggi terhadap program-program yang dicanangkan pemerintah dan melibatkan LLDIKTI sangatlah besar dan cukup membantu dengan mengikuti program perencanaan kegiatan penguatan program MBKM.

LLDIKTI XI berharap dapat meningkatkan kapasitas SDM yang lebih mumpuni agar dapat langsung merespon program pemerintah. Oleh karena itu dukungan-dukungan pengembangan dan penempatan SDM benar-benar dibutuhkan oleh LLDIKTI XI. Kehadiran MBKM yang notabenehnya masuk sebagai indikator kinerja unit LLDIKTI direspon dengan pemetaan prosedur dan layanan yang relevan dengan program MBKM dengan meanggarkan kegiatan khusus MBKM pada tahun 2024.

2. Bidang Kebudayaan

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru menyampaikan secara tertulis mengenai implementasi UU No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan di Kota Banjarbaru sebagai berikut.

- a. Kota Banjarbaru sudah memiliki Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan yang disahkan pada November 2019 melalui Keputusan Walikota Banjarbaru No.188.45/609/KUM/2019.

- b. Program pemajuan kebudayaan di Kota Banjarbaru sudah disusun dan dilaksanakan untuk mendukung visi pemerintah kota Banjarbaru, namun terdapat permasalahan mendasar, yaitu:
 - 1) tidak ada rencana induk pemajuan kebudayaan yang sah dan dipatuhi;
 - 2) kurangnya kualitas dan kuantitas SDM pada sektor kebudayaan;
 - 3) kurangnya kerjasama lintas sektor demi memajukan kebudayaan;
 - 4) belum ada UPTD untuk mendukung pemajuan kebudayaan;
 - 5) rendahnya kesadaran peran dan fungsi kebudayaan.
- c. Upaya Pemda Kota Banjarbaru untuk mencatat dan mendokumentasikan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) antara lain melalui penyelenggaraan even "Pekan Kebudayaan Daerah". Namun kegiatan pencatatan dan pendokumentasian terkendala:
 - 1) hasil catatan dan dokumentasi belum terpadu;
 - 2) tidak ada program khusus untuk riset kebudayaan;
 - 3) kurangnya SDM untuk menginventarisir OPK pada pekan kebudayaan daerah;
 - 4) tidak ada tim survei pada struktur tim penyusun PPKD.
- d. Pemda Kota Banjarbaru melalui Dinas PORABUDPAR sudah melakukan publikasi informasi OPK melalui penyelenggaraan even, pelatihan dan sosialisasi. Namun, tidak ada indikator keberhasilan program yang berkaitan dengan capaian inventarisasi, pengamanan, dan penyelamatan OPK.

3. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dukungan Pemerintah Kota Banjarbaru terhadap target-target Pemerintah Pusat dalam kepariwisataan dan ekonomi kreatif pada 2023 mencakup dukungan alokasi anggaran, promosi destinasi lokal, fasilitasi perizinan, dan pembangunan infrastruktur pendukung.

Bagi Pemerintah Kota Banjarbaru, upaya promosi destinasi lokal merupakan kunci pengembangan pariwisata, di mana Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dalam merancang kampanye pemasaran untuk menarik perhatian wisatawan domestik maupun mancanegara.

Pemerintah Kota Banjarbaru juga menjadikan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi bagian integral dari dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan pariwisata daerah. Hal ini dinilai oleh Pemerintah Kota Banjarbaru dapat membantu menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi dinamika industri pariwisata.

Terkait upaya pemulihan industri pariwisata pasca Covid-19, Pemerintah Kota Banjarbaru memberikan dukungan dengan serangkaian langkah yang mencakup aspek keamanan kesehatan, stimulus ekonomi,

promosi, dan adaptasi terhadap perubahan perilaku wisatawan. *Pertama*, kebijakan dan protokol kesehatan yang ketat diterapkan untuk memastikan keselamatan wisatawan dan masyarakat setempat. *Kedua*, stimulus ekonomi berupa insentif fiskal, pembebasan pajak, atau bantuan keuangan kepada pelaku usaha pariwisata yang terdampak. Selanjutnya Pemerintah Kota Banjarbaru mengusulkan agar Pemerintah menerbitkan kebijakan pemberian pinjaman dengan suku bunga rendah atau subsidi gaji untuk menjaga keberlanjutan bisnis bagi pelaku pariwisata.

Pemerintah Kota Banjarbaru memberikan usulan atas upaya Revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisatahan oleh Komisi X DPR RI yaitu adanya regulasi yang mengatur peningkatan penerapan pengelolaan pariwisata keberlanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, peningkatan SDM kepariwisatahan, pemberdayaan masyarakat lokal serta penguatan regulasi terkait pariwisata berbasis teknologi, penyesuaian kebiasaan dan budaya pariwisata pasca Covid-19. Ditambahkan, Revisi UU Kepariwisatahan diusulkan mampu mencerminkan evolusi dinamika industri pariwisata dan perubahan kebutuhan masyarakat, sekaligus memastikan bahwa regulasi tetap relevan dan memberikan arah yang jelas bagi pengembangan sektor pariwisata Indonesia.

Pemerintah Kota dan masyarakat Banjarbaru berharap kebijakan Pemerintah Pusat dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif melibatkan daerah berpartisipasi lebih aktif dalam pengambilan keputusan, alokasi anggaran yang memadai, dukungan infrastruktur, peningkatan kerja sama antar pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, peningkatan sumberdaya manusia serta pembangunan yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

4. Bidang Olahraga dan Kepemudaan

Terkait upaya pengembangan karakter pemuda di Kota Banjarbaru, dalam pelaksanaannya memiliki permasalahan, di antaranya:

- a. tidak adanya ruang/gedung pemuda di kota Banjarbaru sebagai sarana untuk pengembangan potensi pemuda guna mencegah arus materialisme dan *hedonism* mengakibatkan redupnya nasionalisme para pemuda sehingga menurunkan rasa persaudaraan dan semakin tajamnya individualisme;
- b. kelompok usia muda kurang mampu dalam menyesuaikan dengan peluang partisipasi politik yang makin terbuka;
- c. meningkatnya kekerasan di kalangan remaja dan ketidakjujuran yang merajalela;
- d. menurunnya rasa hormat kepada orang tua, guru dan pemimpin
- e. meningkatnya rasa saling curiga dan kebencian;
- f. menurunkan rasa tanggung jawab sebagai individu; dan

- g. perilaku merusak diri dengan narkoba dan seks bebas, dan semakin kaburnya pedoman moral.

Terkait pembinaan olahraga prestasi, Pemerintah Kota Banjarbaru mengalami permasalahan kurangnya sarana dan prasarana. Hal ini dikarenakan kurangnya dana pemerintah kota untuk membangun dan mengadakan sarana dan prasarana pendukung olahraga. Adapun upaya minimal yang telah dilakukan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam hal ini Disporbudpar Kota Banjarbaru melalui KONI Kota Banjarbaru menyediakan dana pembinaan kepada cabor-cabor untuk keperluan penyewaan tempat latihan maupun penyediaan alat-alat latihan.

Pemerintah Kota Banjarbaru mendapatkan sosialisasi UU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Keolahragaan dari Kemenpora hanya melalui pembagian buku UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan melalui Dispora Provinsi Kalimantan Selatan.

Terkait upaya penguatan pemberdayaan ekonomi pemuda, terdapat tantangan yang dialami oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yaitu sebagai berikut.

- a. Adanya ledakan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan lapangan kerja sebagai dampak dari perpindahan Ibukota Provinsi ke Kota Banjarbaru;
- b. kurangnya pengetahuan untuk menjadi pelaku ekonomi yang mandiri;
- c. masih kurangnya perhatian Pemerintah terhadap peran pemuda di daerah khususnya Kota Banjarbaru dalam hal pemberian intensif/ bantuan bagi mereka yang ingin menjadi wirausaha muda.

5. Bidang Perpustakaan

Kota Banjarbaru memiliki satu gedung perpustakaan umum daerah sebagai gedung perpustakaan umum, dan empat gedung perpustakaan di tingkat kecamatan serta sebuah Pojok Baca Digital (POCADI) di Mal Pelayanan Publik.

Data jumlah koleksi buku sebanyak 20.113 buku dengan rincian:

- a. Buku Cetak sebanyak 14.553 judul buku
- b. Buku digital yang dapat diakses di i.Banjarbaru sebanyak 2.253 judul dan di POCADI sebanyak 3.820 judul.

Layanan perpustakaan umum Kota Banjarbaru memiliki fasilitas, sebagai berikut:

Ruangan	Jumlah	Keterangan
Ruang Baca Umum dan bermain anak	1	
Studio Mini	1	Kapasitas tempat duduk 40 kursi
Ruang Referensi	1	Memiliki ruang baca umum dan ruang diskusi

Kafe Literasi	1	Tempat membaca umum yang dapat memesan makan minum dan disediakan fasilitas untuk menyusun makalah, skripsi, teses dan tugas akhir bagi mahasiswa, akses internet dan komputer gratis.
---------------	---	--

Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan umum pada tahun 2022 mencapai 12.275 orang dan pada tahun 2023 mencapai 74.909 (meningkat 499%). Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Banjarbaru mencapai 30,65 dengan predikat “Baik” dan Tingkat Kegemaran Membaca mencapai 69,10 dengan predikat “Sedang”.

Pemda Kota Banjarbaru memberikan dukungan kepada Pustakawan Madya melalui Tunjangan Kinerja Daerah sebesar Rp3.700.000,00 yang dikukuh melalui Perwali No.3 Tahun 2022. Sesuai Perpres No. 71 Tahun 2013 Tunjangan Jabatan Pustakawan Madya sebesar Rp1.100.000,00. Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Kota Banjarbaru belum berjalan dengan baik karena terkendala anggaran. Pemda sudah mengupayakan kerja sama dengan SKPD dan instansi terkait. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarbaru mengadakan kerja sama dengan Perguruan Tinggi sekolah terkait “bebas pustaka” ketika akan mengikuti yudisium/wisuda.

D. Masukan dan Aspirasi Pemangku Kepentingan Daerah Dalam Diskusi Bersama Anggota Komisi X DPR RI

1. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Said Abdullah dalam kesempatannya menyampaikan informasi dan masukan dengan poin utama sebagai berikut.
 - a. Kota Banjarbaru sejak tahun 2022 telah ditetapkan sebagai ibukota Kalsel, maka berharap dilengkapi sarana dan prasarana regional pendukung dan menyampaikan masih terdapat 70 persen lahan yang belum tergarap untuk dimanfaatkan.
 - b. Pemerintah Kota Banjarbaru memiliki keinginan untuk membangun stadion berstandar internasional dan telah menyiapkan lahannya.
 - c. Penyelenggaraan pembelajaran di sekolah masih terkendala dengan masih kurangnya ruangan kelas, maka jam belajar sore di Kota Banjarbaru masih terjadi.
 - d. Dari sisi anggaran pendidikan, Kota Banjarbaru merupakan terkecil se-Kalimantan Selatan untuk pembiayaan pendidikan.
 - e. Mengusulkan agar perlu perbaikan kurikulum dengan menekankan agar pemerintah daerah diberikan ruang banyak untuk memasukkan materi pelajaran lokal dan materi pengajaran agama di sekolah umum (Fiqih, Aqidah Akhlak dan Shirah Nabawi) yang lebih banyak. Saat ini, sudah terdapat materi pelajaran pondok pesantren yang dimodifikasi untuk masuk ke sekolah SMP.

2. Perwakilan DPRD Kota Banjarbaru dalam kesempatannya menyampaikan informasi dengan poin utama di antaranya sebagai berikut.
 - a. Setelah ditetapkan sebagai ibu kota, Kota Banjarbaru dari sisi dukungan DAU tidak ada mengalami penambahan.
 - b. Ketiadaan sumberdaya alam yang potensial, APBD Kota Banjarbaru tergolong kecil dengan hanya sebesar 1,5 Triliun, sehingga kewajiban pembiayaan sesuai yang diamanahkan di dalam UU (*mandatory spending*) tidak bisa dipenuhi.
 - c. Pemerintah perlu memberikan perhatian besar untuk Kota Banjarbaru setelah ditetapkan sebagai ibukota baru seperti sarana jalan, listrik dan air.
 - d. Pembukaan ruang kelas baru sekolah negeri membawa dampak berkurangnya minat siswa masuk ke sekolah swasta, maka perlu memberikan ruang bagi sekolah swasta agar tetap eksis karena sumber pembiayaannya dari siswa.
3. Perwakilan Bappeda Kota Banjarbaru dalam kesempatannya menyampaikan informasi dan masukan sebagai berikut.
 - a. Pemerintah Kota Banjarbaru memiliki program penguatan penguasaan bahasa Inggris untuk guru dengan bekerjasama dengan Universitas Cambridge untuk 70 orang guru.
 - b. Pemerintah Kota Banjarbaru juga memiliki program memberangkatkan guru agama ke Tarim Yaman untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan agama di Banjarbaru.
 - c. Dengan ditetapkannya Kota Banjarbaru, maka Kota Banjarbaru akan menjadi daerah tujuan utama, maka perlu memikirkan fasilitas hunian dan pendidikan.
 - d. Mendorong agar adanya defensi ulang terhadap penerapan *mandatory spending* untuk alokasi infrastruktur dan pendidikan yang sudah sangat memberatkan pemerintah daerah.
4. Asisten Deputi Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi, Kemenpora RI) dr. Bayu Rahadian, Sp.Kj dalam kesempatannya memberikan respon sebagai berikut.
 - a. Kemenpora sudah tidak memberikan bantuan infrastruktur pembangunan stadion, karena sejak tahun anggaran 2020 dukungan anggaran pembangunan stadion sudah tidak dianggarkan kembali. Dan pada tahun anggaran 2024 akan lebih fokus pada pembiayaan hanya untuk infrastruktur penyelenggaraan PON di Sumut-Aceh.
 - b. Pembangunan stadion juga boleh mendapatkan dukungan pembiayaan pendamping dari Pemkab/Kota.
 - c. Pengusulan melalui proposal tetap diperlukan hanya renovasi stadion milik pemerintah daerah.
5. Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru-Dedy Sutoyo menyampaikan masukan dan saran secara tertulis sebagai berikut.

- a. Program Organisasi Penggerak (POP) dilaksanakan lebih kreatif dalam mengkatalisasi program Kemendikbudristek dan mampu menciptakan inovasi berdasarkan kebutuhan di lapangan.
 - b. Kemendikbudristek dapat memberikan solusi terhadap kendala dalam mekanisme penyaluran PIP yaitu adanya kesenjangan pengetahuan dalam memahami kebijakan dari verifikator di sekolah.
 - c. Perencanaan jumlah rekrutmen Guru PPPK agar disesuaikan dengan jumlah guru pensiun dan kebutuhan formasi di sekolah.
6. Kepala LLDIKTI Wilayah XI Kalimantan menyampaikan permasalahan dan masukan terkait penyelenggaraan PTS adalah sebagai berikut.
- a. Mahalnya proses reakreditasi yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).
 - b. Untuk dapat meningkatkan kapasitas SDM yang lebih mumpuni agar dapat langsung merespon program pemerintah. LLDIKTI XI dukungan pengembangan dan penempatan SDM.
7. Kepala Dinas PORABUDPAR menyampaikan masukan dan permasalahan implementasi UU No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan adalah sebagai berikut.
- a. Agar Pemerintah Pusat mempertegas fungsi PPKD sebagai acuan perancangan program pemajuan kebudayaan di daerah.
 - b. Pemerintah Pusat melakukan pembinaan untuk meningkatkan kualitas PPKD Kota Banjarbaru.
 - c. Kurangnya SDM yang kompeten dalam tim penyusun PPKD.
 - d. Pemahaman UU No. 5 tahun 2017 tidak merata pada sektor selain kebudayaan.
 - e. Tidak ada *reward* dan *punishment* bila tidak mematuhi UU No. 5 tahun 2017.

Terhadap rencana pembahasan RUU tentang Bahasa Daerah, Kepala Dinas PORABUDPAR memberikan masukan, agar terdapat substansi mengenai standar operasional prosedur (SOP) inventarisasi bahasa daerah, adanya langkah-langkah pelestarian dan pembentukan tim ahli bahasa daerah.

8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah menyampaikan masukan dan permasalahan layanan perpustakaan daerah sebagai berikut.
- a. Mobil Keliling Perpustakaan kondisinya sudah tua dan sering mogok mengingat mobil tersebut keluaran tahun 2005 dan 2010, meski sudah dilakukan perbaikan, kondisi tersebut tetap terjadi. Biaya perbaikan cukup membebani Dinas. Pada tahun 2023 sudah mengusulkan bantuan Mobil Perpustakaan Keliling ke Perpustakaan Nasional, namun belum terealisasi.
 - b. Membutuhkan dukungan tambahan pengadaan komputer di Kafe Literasi Gedung Perpustakaan Umum Kota Banjarbaru.
 - c. Tenaga pengelola perpustakaan sebagian besar Non ASN sebanyak 16 orang, diusulkan agar ada formasi PPPK pada rekrutmen yang akan datang.

9. Komisi X DPR RI dalam hal ini diwakili oleh Ketua Tim Kunker Dr. Abdul Fikri Faqih, MM dan Anggota Komisi X DPR RI Dr. H. Fahmi Alaydroes, M.M., Med memberikan respon sebagai berikut.
 - a. Komisi X DPR RI memberikan dukungan Kota Banjarbaru mendapatkan dukungan fasilitas penunjang layaknya sebagai ibukota provinsi.
 - b. Komisi X DPR mendorong agar Kota Banjarbaru sebagai ibukota provinsi unggul karena SDM nya, maka program dukungan peningkatan SDM menjadi hal yang perlu diprioritaskan melalui pendidikan dan literasi.

III. KESIMPULAN & REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Bidang Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi

- a. Penyelenggaraan pendidikan di Kota Banjarbaru secara umum sudah berjalan dengan baik, bahkan untuk penyelenggaraan pendidikan khusus dan layanan khusus, Pemda memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk melayani 681 siswa difabel.
- b. Meski penyaluran dana PIP dan BOS berjalan dengan baik, mekanisme penyalurannya masih terkendala adanya kesenjangan pengetahuan dalam memahami kebijakan dari verifikator di sekolah.
- c. Peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh masyarakat (PTS) masih terkendala mahalannya proses reakreditasi yang dilakukan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

2. Bidang Kebudayaan

Meski Kota Banjarbaru sudah memiliki Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang disahkan melalui Keputusan Walikota Banjarbaru No.188.45/609/KUM/2019, namun secara umum pemajuan kebudayaan belum dilaksanakan dengan baik. Beberapa permasalahan mendasar, yaitu: (i) rendahnya kesadaran peran dan fungsi pemajuan kebudayaan, (ii) belum ada UPTD untuk mendukung pemajuan kebudayaan, (iii) kurangnya kualitas dan kuantitas SDM pemajuan kebudayaan (sektor kebudayaan), (iv) kurangnya kerja sama lintas sektor untuk memajukan kebudayaan.

3. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- a. Pemerintah Kota Banjarbaru mengupayakan promosi destinasi lokal, pengembangan sumberdaya manusia dan melakukan integrasi dan kolaborasi antara pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif daerah sebagai kunci pengembangan pariwisata Kota Banjarbaru.
- b. Pemerintah Kota Banjarbaru memberikan mengupayakan pemulihan industri pariwisata pasca Covid-19, dengan serangkaian langkah yang mencakup aspek keamanan kesehatan, stimulus ekonomi, promosi, dan adaptasi terhadap perubahan perilaku wisatawan. Pemerintah Kota Banjarbaru juga mengusulkan agar Pemerintah menerbitkan kebijakan pemberian pinjaman dengan suku bunga rendah atau subsidi gaji untuk menjaga keberlanjutan bisnis bagi pelaku pariwisata.

- c. Pemerintah Kota Banjarbaru mengusulkan beberapa substansi Revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, *pertama*, peningkatan penerapan pengelolaan pariwisata keberlanjutan, *kedua*, peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, *ketiga*, peningkatan SDM kepariwisataan, *keempat*, pemberdayaan masyarakat lokal serta penguatan regulasi terkait pariwisata berbasis teknologi, *kelima*, penyesuaian kebiasaan dan budaya pariwisata pasca Covid-19 dan *keenam*, revisi UU Kepariwisata mampu mencerminkan evolusi dinamika industri pariwisata dan perubahan kebutuhan masyarakat.

4. Bidang Olahraga dan Kepemudaan

- a. Upaya pengembangan kepemudaan di Kota Banjarbaru mengalami kendala pada persoalan pembentukan karakter dan pemberdayaan ekonomi pemuda. Minimnya anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banjarbaru menjadi penyebab tidak maksimalnya upaya pengembangan pemuda di Kota Banjarbaru.
- b. Terkait pembinaan olahraga prestasi, Pemerintah Kota Banjarbaru mengalami permasalahan kurangnya sarana dan prasarana. Hal ini dikarenakan kurangnya dana pemerintah kota untuk membangun dan mengadakan sarana dan prasarana pendukung olahraga, di satu sisi Pemerintah Kota Banjarbaru memiliki keinginan untuk membangun stadion berstandar internasional dan telah menyiapkan lahannya.
- c. Sosialisasi UU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Keolahragaan di Kota Banjarbaru berupa pembagian buku melalui Dispora Provinsi Kalimantan Selatan tanpa adanya kegiatan sosialisasi/diseminasi.

5. Bidang Perpustakaan dan Literasi

Masyarakat yang mengakses bahan bacaan melalui perpustakaan keliling mengalami kendala karena kondisi kendaraan sudah tua dan sering mogok.

B. Rekomendasi

1. Komisi X DPR RI mendukung Pemerintah Pusat memberikan fasilitas penunjang yang layak untuk Kota Banjarbaru dalam melaksanakan fungsinya sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya terkait fasilitas infrastruktur pariwisata dan olahraga.
2. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk secara berkesinambungan memperbaiki pola sosialisasi dan pendampingan kepada Pemda dan satuan pendidikan terkait mekanisme penyaluran dana bantuan pendidikan, antara lain PIP dan BOS.
3. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk segera menyosialisasikan kebijakan Merdeka Belajar Episode 26 yang dituangkan melalui Permendikbudristek No.53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan tinggi (LLDIKTI) agar penyelenggaraan PTS mengetahui dan memahami substansi penyederhanaan akreditasi dan beban biaya akreditasi wajib yang ditanggung Pemerintah.

4. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk segera mengevaluasi dan menyusun strategi implementasi bagi daerah yang sudah memiliki Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang telah disahkan melalui Perda, namun belum mampu melaksanakan pemajuan kebudayaan.
5. Komisi X DPR RI dalam hal ini Panja RUU Kepariwisata untuk mempertimbangkan masukan dari pemangku pariwisata Kota Banjarbaru terkait substansi RUU Kepariwisata, yaitu: *pertama*, peningkatan penerapan pengelolaan pariwisata keberlanjutan, *kedua*, peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, *ketiga*, peningkatan SDM kepariwisataan, *keempat*, pemberdayaan masyarakat lokal serta penguatan regulasi terkait pariwisata berbasis teknologi, *kelima*, penyesuaian kebiasaan dan budaya pariwisata pasca Covid-19 dan *keenam*, revisi UU Kepariwisata mampu mencerminkan evolusi dinamika industri pariwisata dan perubahan kebutuhan masyarakat.
6. Komisi X DPR RI mendorong Kemenpora RI untuk segera:
 - a. memperbaiki pola sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan agar Pemerintah Daerah memahami substansinya dan menjadi panduan pemerintah daerah merencanakan dan melaksanakan program-program pembinaan olah raga prestasi dan masyarakat;
 - b. membuat skema pendampingan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen rencana induk kebijakan keolahragaan daerah (DOD) untuk mendukung pembinaan olahraga di daerah baik dari sisi dukungan infrastruktur olahraga maupun anggaran pembinaan olahraga di daerah.
7. Komisi X DPR RI mendorong Kemenpora RI untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam memfasilitasi program-program pembinaan karakter dan pemberdayaan ekonomi pemuda di daerah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
8. Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan RI untuk melakukan evaluasi dan inventarisasi kondisi sarana layanan perpustakaan keliling yang dimiliki perpustakaan daerah, untuk selanjutnya dilakukan kajian yang bertujuan melakukan revitalisasi sarana layanan perpustakaan keliling.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023—2024 ke Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan kajian dalam pengambilan kebijakan.

Jakarta, 16 Januari 2024

Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Ttd.

Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM.

A - 444